

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada 1 Desember 2019, ditemukan kasus pertama virus Corona di Wuhan, Cina, dimana gejala yang dialami oleh pasien berupa demam, batuk kering, susah bernafas, serta lemas, yang saat itu juga disalahartikan sebagai penyakit Pneumonia.¹ Virus tersebut menyebar dengan cepat ke-178 negara dan mempengaruhi 99,5% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Hal ini kemudian mendorong World Health Organization (WHO) menetapkan kasus Covid-19 sebagai pandemi global pada Maret 2020.² Pada tahun 2021, data menunjukkan kurang lebih sebanyak 200 juta orang telah terpapar virus ini, dengan lebih dari empat juta diantaranya meninggal dunia.

Dengan adanya kasus tersebut, tentu masing-masing negara berpikir untuk menyelamatkan diri dari keterpurukan yang diakibatkan oleh pandemi ini. Salah satu faktor yang dapat membantu pemulihan negara tentu hadirnya vaksin yang didistribusikan secara merata. Hal ini yang nantinya akan berdampak pada semua sektor termasuk perekonomian negara.

Adapun beberapa langkah darurat yang diambil pemerintah di berbagai negara menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Sebagian besar negara memutuskan

¹ The College of Physicians of Philadelphia, "Coronavirus | History of Vaccines," <https://historyofvaccines.org/diseases/coronavirus/> (diakses 7 Agustus 2022).

² Bank Indonesia, "Krisis Kemanusiaan COVID-19 Dan Implikasinya Pada Tatanan Perekonomian Global," *Laporan Perekonomian Indonesia* (2020): 20.

untuk membatasi kegiatan dan mobilitas masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi serta pendapatan masyarakat menjadi tidak efektif.³ Adanya pembatasan mobilitas masyarakat saat pandemi menyebabkan pengurangan barang-barang impor dari China, pembatasan bahan bakar minyak untuk transportasi, pembatasan tenaga kerja di pertambangan.⁴ Selain itu, pembatasan mobilitas masyarakat juga berdampak kepada harga bursa saham dan ekonomi lainnya. Beberapa sektor juga ikut terdampak oleh adanya pandemi ini, misalnya sektor pariwisata dan transportasi yang dibuktikan dengan berkurangnya operasi maskapai penerbangan serta jumlah wisatawan yang membatalkan rencana perjalanan mereka.⁵ Kondisi ini kemudian mendorong negara-negara maju untuk saling berinovasi agar segera memperoleh solusi untuk pandemi Covid-19 ini.

Kemampuan dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara tentu memiliki pengaruh besar terhadap cara negara tersebut menghadapi tantangan. Pandemi Covid-19 menunjukkan eksistensi dari masing-masing negara, baik negara maju maupun negara berkembang yang mengerahkan kekuatan mereka untuk menghadapi tantangan ini. Tingginya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara maju, tentu saja membuat negara tersebut mampu membentuk strategi dan terus berinovasi untuk menyelamatkan ekonomi negaranya dengan cepat.

³ Oxford Economics, "World Economic Prospects: Global Economy to Fall into a Recession," <https://www.oxfordeconomics.com/> (diakses 7 Agustus 2022).

⁴ Shabir Ahmad Lone dan Aijaz Ahmad, "Covid-19 Pandemic -an African Perspective," (Juni 2020), <https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1775132> (diakses pada 10 Agustus 2022)

⁵ Nunes, Ashley, "How Covid-19 Will Change Air Travel as We Know It," BBC, *10 July 2020*, <https://www.bbc.com/future/article/20200709-how-covid-19-will-change-air-travel-as-we-know-it/> (diakses 8 Agustus 2022).

Hal ini yang dilakukan oleh negara-negara maju seperti Cina, Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan Jerman. Dari negara-negara tersebut, Amerika Serikat dan Jerman menjadi dua negara yang berhasil menciptakan vaksin Covid-19 pertama yang diakui oleh Food and Drug Administration (FDA), yakni Pfizer, tepatnya pada bulan Agustus 2021 melalui perusahaan milik Jerman, BioNTech.⁶ Banyaknya negara yang berhasil menciptakan serta merasakan manfaat pemulihan ekonomi dari vaksin Covid-19, membuat pemerintah di berbagai negara mulai meningkatkan penetrasi vaksinasi terhadap masyarakatnya.

Sementara itu, negara berkembang menjadi lebih terpuruk dibanding negara maju dengan adanya pandemi Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari kondisi India dan Afrika Selatan yang cukup tertinggal jauh dibandingkan dengan negara maju. Kesenjangan yang terjadi antara negara berkembang dan negara maju dapat dilihat dari perbandingan persentase masyarakat yang menerima vaksin di Benua Afrika dan negara maju seperti Amerika Serikat maupun Jerman.⁷

Keberhasilan vaksin yang telah dibuat oleh negara maju, khususnya Amerika Serikat dan Jerman menimbulkan kontroversi di antara berbagai negara, diakibatkan oleh adanya perlindungan hak kekayaan intelektual atau *Intellectual Property* (IP) yang menyebabkan harga vaksin menjadi tinggi sehingga tidak terjangkau oleh negara-negara lain, khususnya negara berkembang, seperti Afrika

⁶ US Food & Drug, "Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccines," FDA, 15 Juni 2020, <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccines/> (diakses 8 Agustus 2022).

⁷ Nicholas Reimann, "Germany Doesn't Support Covid Vaccine Waivers, Report Says—Which Could Kill Biden-Supported Plan," *May 6 2021 (Forbes)*, <https://www.forbes.com/sites/nicholasreimann/2021/05/06/germany-doesnt-support-covid-vaccine-waivers-report-says-which-could-kill-biden-supported-plan/?sh=7279386e5e08/> (diakses 10 Agustus 2021).

Selatan dan India.⁸ Tingginya harga vaksin tersebut kemudian memaksa Afrika Selatan dan India mengajukan permohonan kepada *World Trade Organization* (WTO) untuk melakukan IP *waiver* terhadap vaksin Covid-19 demi menyelamatkan kestabilan negaranya. Permohonan yang diajukan oleh Afrika Selatan dan India kemudian mendapatkan respons baik dari WTO, dimana pihak WTO kemudian mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat.⁹ Namun, keputusan dukungan yang diambil oleh WTO dan Amerika Serikat menimbulkan perlawanan dari Jerman sebagai negara yang ikut berperan dalam pembuatan vaksin Covid-19.

Tindakan yang diberikan oleh WTO dan Amerika Serikat untuk memberikan dukungan terhadap negara berkembang dengan menanggukkan paten vaksin Covid-19 bagi negara berkembang selama lima tahun,¹⁰ dan melepaskan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk vaksin Covid-19,¹¹ ditentang oleh Jerman. Menurut Jerman, pengabaian hak paten vaksin merupakan tindakan yang menghambat perusahaan untuk terus maju dengan penelitian baru.¹² Ketidaksetujuan dari beberapa negara termasuk Jerman dengan sektor farmasi besar

⁸ World Trade Organization, "Waiver From Certain Provisions Of The Trips Agreement For The Prevention, Containment And Treatment Of Covid-19," *Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* 669, no. 2 (2020): 1–4.

⁹ Rizky Banyualam Permana, "Amerika Akan Lepaskan Paten Vaksin COVID-19, Apa Dampaknya Bagi Indonesia Dan Negara Berkembang?" *The Conversation*, 7 Juli 2021, <https://theconversation.com/amerika-akan-lepaskan-paten-vaksin-covid-19-apa-dampaknya-bagi-indonesia-dan-negara-berkembang-163252/> (diakses 10 Agustus 2022).

¹⁰ Sekar Gandhawangi, "Kesepakatan WTO Dan Ketidaksetaraan Akses Vaksin," *Kompas*, 20 Juni 2022, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/06/18/keputusan-wto-tentang-penanggukan-paten-vaksin-covid-19-dini-ai-mengecewakan/> (diakses 11 Agustus 2022).

¹¹ Rizky Banyualam Permana, "Amerika Akan Lepaskan Paten Vaksin COVID-19, Apa Dampaknya Bagi Indonesia Dan Negara Berkembang?" *The Conversation*, 7 Juli 2021, <https://theconversation.com/amerika-akan-lepaskan-paten-vaksin-covid-19-apa-dampaknya-bagi-indonesia-dan-negara-berkembang-163252/> (diakses 11 Agustus 2022).

¹² Zuzanna Szymanska, "Germany Speaks out against COVID-19 Vaccine Patent Waiver," *Reuters*, 29 Maret 2022, <https://www.reuters.com/world/europe/germany-speaks-out-against-covid-19-vaccine-patent-waiver-2022-03-28/> (diakses 11 Agustus 2022).

juga telah menghambat kemajuan dalam negosiasi di antara kelompok yang lebih besar. Jerman diwakili oleh Menteri Kesehatannya yaitu Jens Spahn menyatakan bahwa, hal yang lebih utama selain IP *waiver* tersebut yaitu berbagi pengetahuan mengenai teknologi yang dimiliki harus seimbang dengan distribusi yang dijalankan, sehingga negara yang memperoleh bantuan dari Jerman tidak bersifat monoton dan lebih merata penyebarannya.¹³

Selain faktor produksi dan kesehatan, penolakan Jerman terhadap IP *waiver* vaksin Covid-19 juga didasari oleh faktor pendapatan negara. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan yang diterima oleh Jerman selama kuartal pertama tahun 2021 dengan penghasilan sebesar 3,5 miliar dolar AS dan laba kotor sebesar 900 juta dolar AS dari vaksin Pfizer. Penolakan Jerman terhadap IP *waiver* ini juga bukan semata-mata hanya untuk Jerman saja, melainkan untuk memberikan perlindungan terhadap BioNTech. Menurut Jerman menghapus perlindungan paten akan memakan keuntungan Jerman yang nantinya berpotensi mengurangi insentif yang mendorong perusahaan BioNTech untuk berinovasi.¹⁴ Ketidaksetujuan Jerman atas IP *waiver* ini juga didukung oleh perusahaan farmasi karena mereka melihat bahwa, Amerika Serikat bukan menghilangkan masalah dengan melakukan IP *waiver* tetapi justru menambah masalah baru karena Amerika menyetujui untuk melepaskan IP pada vaksin Covid-19, namun tidak memberikan bantuan baik dari segi metode

¹³ Elaine Ruth Fletcher, "German Health Minister Pushes Back Hard Against IP Waiver For COVID Vaccines - Predicts Shortages To Become Surplus By 2022 - Health Policy Watch," *Health Policy Watch*, 15 Juli 2021, <https://healthpolicy-watch.news/88732-2/> (diakses 23 Oktober 2022).

¹⁴ Associated Press Reporters, "Germany Opposes US Call to Waive Covid Vaccine Patents," *Irish Examiner*, 06 Mei 2021, <https://www.irishexaminer.com/world/arid-40283354.html/> (diakses 23 Oktober 2022).

maupun bahan untuk pembuatan vaksin tersebut.¹⁵ Jerman meyakini jika ingin melakukan distribusi vaksin yang bersifat efektif dan merata, hal yang dibutuhkan tidak hanya seputar keinginan, melainkan harus diimbangi oleh keterbukaan dan peran aktif dari setiap negara terkait.

Namun pada bulan Juni 2021, Afrika Selatan dan India berhasil mendapatkan dukungan dari Jerman dan anggota *Group 7* (G7) lainnya, seperti Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Jepang dan Amerika Serikat.¹⁶ Banyak pertimbangan yang dipikirkan oleh negara anggota G7 yaitu India telah secara aktif terlibat dengan komunitas internasional di tingkat *Group 20* (G20), G7, dan Majelis Kesehatan Dunia dalam berbagai aspek yang terkait dengan penanganan pandemi saat ini. Maka dari itu, Perdana Menteri India yakni Narendra Modi sangat berterima kasih kepada G7 dan negara-negara tamu atas dukungan yang ditunjukkan kepada India selama masa pandemi yang sulit dan mendesak ini sehingga dapat membawa India kepada keadaan yang lebih baik dengan meningkatkan upaya-upaya yang turut dihadirkan dari pemerintah India.

Setelah Jerman berhasil menyetujui paten yang ada untuk membantu negara berkembang, maka negara-negara berkembang berhasil memenangkan pengabaian terhadap paten pada vaksin Covid-19 selama lima tahun. Perjanjian yang berhasil dimenangkan tersebut dimaksudkan agar pabrik-pabrik lokal dapat memproduksi

¹⁵ BBC, "Covid: Germany Rejects US-Backed Proposal to Waive Vaccine Patents - BBC News," *BBC News*, 6 Mei 2021, <https://www.bbc.com/news/world-europe-57013096/> (diakses 23 Oktober 2022).

¹⁶ Press Trust of India, "India, S Africa's Proposal for Patent Waiver on Vax Gets G7 Support: MEA | Business Standard News," *Business Standard*, 21 November 2022, https://www.business-standard.com/article/current-affairs/india-s-africa-s-proposal-for-patent-waiver-on-vax-gets-g7-support-mea-121061300798_1.html/ (diakses 10 Agustus 2022).

vaksin ataupun bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat vaksin, tanpa persetujuan dari pemegang paten. Selain itu, vaksin dapat segera diekspor ke negara berkembang lainnya.

Sejak awal pandemi, Afrika Selatan dan India sudah menyuarakan bahwa, terdapat ketimpangan dalam akses ke dosis vaksin. Hal ini juga disetujui oleh WHO yang menyatakan bahwa, 60% populasi dunia telah menerima dua dosis, tetapi situasinya masih tidak adil dengan hanya 17% populasi yang divaksinasi di Libya, 8% di Nigeria dan kurang dari 5% di Kamerun.¹⁷ Adanya pengaturan terkait pengabaian paten vaksin Covid-19 tersebut tentunya bertujuan untuk mempercepat distribusi vaksin yang ada sehingga negara berkembang seperti Afrika Selatan dan India dapat memperoleh distribusi vaksin yang merata seperti negara lain dan dapat segera bangkit dari keterpurukan akibat pandemi.

Pandemi Covid-19 menyebabkan semua negara baik maju maupun berkembang berupaya untuk mempertahankan kestabilan masing-masing negara. Hal ini terlihat dari keberhasilan negara maju dalam menciptakan vaksin Covid-19, sementara keadaan sebaliknya terjadi pada negara berkembang yang semakin terpuruk akibat ketidakmampuannya menghadapi pandemi. Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana dampak Covid-19 khususnya di negara berkembang sebagai latar belakang terbentuknya kebijakan IP *waiver*. Selanjutnya, penulis juga akan menganalisis faktor yang mempengaruhi

¹⁷ Africanews, "Developing Countries Win WTO Vaccine Waiver," *Africanews*, 20 Juni 2022, <https://www.africanews.com/2022/06/20/developing-countries-win-wto-vaccine-waiver/> (diakses 15 Agustus 2022).

Jerman berubah keputusan sehingga mendukung implementasi dari IP *waiver* tersebut.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Tingginya harga vaksin Covid-19 yang diakibatkan oleh IP menyebabkan ketidakmampuan negara-negara berkembang untuk memperoleh vaksin. Serta tidak mendapatkan pendistribusian yang merata. Hal ini juga mendorong Afrika Selatan dan India sebagai perwakilan dari negara berkembang mengajukan proposal IP *waiver* vaksin Covid-19 agar mendapatkan distribusi yang merata bagi masyarakatnya. Namun, dalam proses pengajuannya kedua negara ini mendapatkan penolakan, khususnya dari Jerman sebagai negara yang berhasil menciptakan vaksin Pfizer sebagai vaksin pertama yang diakui FDA. Meskipun Jerman pernah tidak setuju atas kebijakan IP *waiver* tersebut, pada akhirnya Jerman mendukung kebijakan ini karena beberapa pertimbangan yang menyangkut kepada keuntungan negara itu sendiri. Oleh karena itu, fokus penelitian ini bertujuan untuk meneliti hal ini:

Faktor-faktor apa yang menyebabkan perubahan sikap Jerman terkait kebijakan *Intellectual Property* vaksin Covid-19 ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan kondisi negara berkembang ketika masa pandemi khususnya dalam distribusi vaksin, sehingga dapat memahami latar belakang dari hadirnya kebijakan IP Waiver yang diajukan terhadap WTO.

2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor apa saja yang menyebabkan Jerman berpindah pendirian untuk mendukung kebijakan dari WTO dan Amerika Serikat agar memberlakukan IP *waiver* terhadap vaksin Covid-19.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para pembaca. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor dari berpindahnya dukungan Jerman terhadap IP *waiver* vaksin Covid-19. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi para peneliti lain yang tertarik dengan topik serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Terdapat lima bagian pada sistematika penulisan dalam penelitian ini, bagian tersebut dibagi menjadi

BAB I : Bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang serta ruang lingkup penelitian yang menguraikan sejarah awal penyebaran virus Covid-19 hingga menjadi pandemi global, juga bagaimana bentuk-bentuk isu global yang muncul sehingga mendorong terciptanya vaksin Covid-19. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana respon dari negara maju, khususnya Amerika Serikat dan Jerman sebagai negara yang pertama kali berhasil menciptakan vaksin Covid-19 yang diakui oleh FDA terhadap respon WTO terkait pengajuan IP *waiver* vaksin Covid-19 yang diajukan oleh Afrika Selatan dan India.

BAB II : Bagian ini menyajikan tinjauan sudut pandang dari para ahli mengenai topik penelitian yang serupa. Tinjauan pustaka ini akan memberikan pemahaman serta cara pandang dari para ahli yang nantinya dapat digunakan untuk menjadi pedoman dalam topik penelitian ini. Tidak hanya itu, bagian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada celah yang dapat peneliti isi dengan penelitian ini. Pada bagian ini juga terdapat tinjauan mengenai teori dan konsep yang akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis topik penelitian.

BAB III : Bagian ini akan menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Metodologi penelitian ini akan menyajikan beberapa hal seperti pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Uraian dalam metode penelitian ini nantinya akan memberikan pemahaman dalam kajian dan juga dalam penyajian analisis penelitian.

BAB IV : Bagian ini nantinya akan menjawab serta tentunya menjelaskan lebih jauh mengenai rumusan masalah yang sudah dibuat sebelumnya. Disini penulis juga akan menganalisa lebih jauh mengapa Jerman berpindah pendirian dari kontra ke pro. Pada bagian ini juga akan ditulis mengenai apa saja tekanan yang Jerman dapatkan sehingga Jerman mengubah kebijakannya.

BAB V : Pada bagian terakhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan untuk penelitian ini sebagai bentuk pembahasan dari hasil serta jawaban dari pertanyaan penelitian. Demikian pembahasan dalam bab ini yang meliputi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian dari topik penelitian yang berjudul “Faktor

Domestik Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Perubahan Sikap Jerman Terkait Kebijakan Intelektual Properti Vaksin Covid-19”

